

Ringkasan Hasil Penelitian Di Bidang Hukum

Pengelolaan tanah kas desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

(Tatiek Djatmiati, Soedalhar, E. Sujatmoko, Soemardji, Sugi Santosa, 1992 : 53 halaman)

Dalam rangka pembangunan di pedesaan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, desa mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan kewenangan untuk menggali keuangan sendiri dari kekayaan desa sebagaimana diatur di dalam Pasal 21. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, yang akan mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat.

Di samping kewenangan tersebut desa sebagai organisasi pemerintahan terendah juga di dorong untuk memperbaiki administrasi desa. Dengan penghasilan yang memadai, administrasi yang mantap akan dapat meningkatkan pembangunan desa, yang berarti akan memperbaiki kondisi di pedesaan. Sekaligus hal ini mewujudkan cita-cita nasional bahwa desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan. Sehubungan dengan kewenangan untuk melakukan pengelolaan tanah kas desa untuk kepentingan pengelolaan tanah kas desa di atas, terdapat beberapa permasalahan yaitu: Bagaimanakah pengaturan (pelaksanaan) tentang pengelolaan tanah kas desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jatim ?;

Instansi atau pejabat mana saja yang terkait dalam pengelolaan tanah kas desa, dan bagaimana prosedur dan pengawasan pengasingan tanah kas desa ?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui segala kelemahan dan hambatan yang ada dalam pengelolaan tanah kas desa,

proses pengasingannya dan pengawasannya oleh aparat yang berwenang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis analitis, yaitu dengan menginventarisasi ketentuan hukum yang ada tentang pengelolaan tanah kas desa dan memadukannya dengan praktek lapangan.

(L.P. : Fakultas Hukum Universitas Airlangga
462/P4M/DPPM/L.3311/BBI/1992 17 Juni 1992)

